

## PENERAPAN DESENTRALISASI FISKAL DI NEGARA CINA DAN NEGARA INDONESIA

Oleh :

I Made Hendra Wijaya, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

### **Abstract**

*These days economic and financial sector is to determine the progress of a country around the world, in the country of China began to implement the concept of fiscal decentralization to improve the economy and its financial sector after the economic reforms in the 2000s. In Indonesia itself, fiscal decentralization began attending since the fall of the New Order era, namely the beginning of the reform era, with the exclusion of some Act to reinforce the concept of fiscal decentralization in the country of Indonesia. Fiscal decentralization is part of the reform measures around the world, the concept of fiscal decentralization is devolution from central government to local government in the conduct of economic and financial management.*

**Keywords : Fiscal Decentralization, China, Indonesia.**

### **Abstrak**

Dewasa ini sektor ekonomi dan keuangan sangatlah menentukan kemajuan dari suatu negara diseluruh dunia, di negara Cina mulai menerapkan konsep desentralisasi fiskal untuk meningkatkan sektor ekonomi dan keuangannya setelah melakukan reformasi ekonomi pada tahun 2000an. Di Indonesia sendiri desentralisasi fiskal mulai hadir sejak jatuhnya era orde baru yaitu awal-awal era reformasi, dengan dikeluarkannya beberapa Undang-Undang untuk menguatkan konsep desentralisasi fiskal di negara Indonesia. Desentralisasi fiskal sendiri merupakan bagian dari tindakan reformasi di seluruh dunia, konsep desentralisasi fiskal merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke Pemerintah daerah dalam melakukan kegiatan ekonomi dan pengelolaan keuangan.

**Kata Kunci : Desentralisasi Fiskal, Cina, Indonesia.**

## **A. PENDAHULUAN**

salah satu negara maju di dunia adalah

### **1. Latar Belakang Masalah**

negara Cina yang merupakan negara

Dewasa ini sektor ekonomi dan keuangan sangatlah menentukan kemajuan dari suatu negara diseluruh dunia, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa negara maju di dunia, dimana

terbesar di belahan bumi Asia dan sebagai salah satu Negara maju di dunia dengan tingkat perekonomiannya yang melaju begitu cepat pada abad saat ini. Jika dilihat dari paham ideologi negara Cina,

bahwa negara Cina merupakan negara penganut paham sosialis komunis, yang mana segala bidang kegiatan diatur oleh pemerintah pusat atau segala kegiatan negara tergantung kepada pemerintah pusat

Namun dalam era reformasi dan keterbukaan dewasa ini, negara Cina secara *de facto* menggunakan pelaksanaan aliran federalis yang telah didorong oleh konsep desentralisasi antar pemerintah. Konsep desentralisasi sendiri telah banyak digunakan sebagai strategi reformasi oleh pimpinan politik di negara Cina dan pasca negara komunis untuk menetapkan masalah ekonomi dan masalah politik yang dihasilkan dari konsep sentralisasi yang berlebihan dalam perencanaan ekonomi yang lama. Walaupun reformasi negara Cina mengatakan akan berorientasi pasar, mereka lebih serius dalam berupaya menyediakan fitur utama pasar swasta, atau system perlindungan hak properti swasta. Ini terutama disebabkan karena apa yang disebut sebagai paham *de facto*

federalism atau *market-persevering federalism*<sup>1</sup>, yaitu pemerintah Pusat untuk paham *de facto federalism* atau *market-persevering federalism* adalah antar pemerintah desentralisasi. Setelah negara Cina dimulai dalam reformasi ekonomi pada tahun 1979 dan sebelum upaya resentralisasi dalam dekade tahun 1990an. Kepemimpinan di negara Cina yang berada dibawah tangan kekuasaan Deng Xiaoping yang berulang-ulang menekankan penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Desentralisasi antar-pemerintah menyediakan sebuah pengaturan penting terbatas pada perilaku dari semua tingkatan dari pemerintah, yang mana mendukung pertumbuhan ekonomi. Sehingga desentralisasi digunakan sebagai kontrol kekuasaan pemerintah pusat atas ekonomi. Ini juga menyebabkan terjadinya kompetisi antara pemerintah daerah, sehingga hal ini dapat membatasi

---

<sup>1</sup> Gabriella Montinola, Yingyi Qian and Barry R. Weingast, 1995, " *Federalism, chinese Style : The Political basic For Economic Success in China* " *World Politics*, 84, hal. 50-81.

perilaku mereka dan penyediaan mereka terhadap nilai positif dalam sebuah insentif untuk mendorong peningkatan kemakmuran ekonomi daerah<sup>2</sup>. Desentralisasi antar pemerintah sangat sukses dalam mencapai hasil ekonomi tinggi, tapi ini datang dengan biaya dan kontradiksi terhadap hirarki administrasi. Meskipun struktur sentralisasi tetap, biaya dari pemeliharaan struktur menjadi semakin tinggi, meskipun dekonsentrasi antar pemerintah cepat tetap tidak dapat menyebabkan perpisahan di Cina, seperti Uni Soviet. Dibawah desentralisasi antar pemerintah, kekuatan ekonomi bergeser dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah pada tingkat yang berbeda.

Di Indonesia sendiri desentralisasi fiskal mulai hadir sejak jatuhnya era orde baru yaitu awal-awal era reformasi, pada saat awal era reformasi Negara Indonesia mulai menerapkan system Desentralisasi fiskal yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999

tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengatur tentang perimbangan fiskal dan daerah, kemudian dilanjutkan dengan diterbitkannya Undang-Undang tahun 2000 tentang perpajakan pemerintah daerah. Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang memiliki tujuan untuk lebih menentukan kembali hubungan administrasi antar pemerintah yang lebih signifikan, serta lebih memberikan penegasan mengenai peran baru yang signifikan dari pemerintahan provinsi di daerah sebagai wakil dari Pemerintah Pusat untuk urusan daerah. Selain Undang-Undang di atas terdapat juga Undang-Undang lainnya yang memberikan status legal formal kepada desentralisasi fiskal di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hal. 79.

Kuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur tentang hal-hal mengenai kewenangan pemerintahan daerah dalam hal pemungutan pajak kepada masyarakat di daerah yang tujuannya untuk mendapatkan pendanaan bagi pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan system desentralisasi di Indonesia, perolehan pendapatan di daerah seluruh Indonesia mengalami peningkatan, namun hal itu, perkembangan yang lebih cepat berada pada daerah yang relatif kaya, sedangkan untuk daerah yang relatif miskin perkembangannya tidaklah secepat pada daerah yang relatif kaya. Pada tahun 1999 Indonesia mengalami penurunan tingkat kemiskinan sebanyak 24 persen, dan di tahun 2005 tingkat kemiskinan menurun

menjadi 18 persen berkat dilaksanakannya sistem desentralisasi di Indonesia.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi Fiskal berasal dari dua kata yaitu Desentralisasi dan Fiskal, desentralisasi adalah merupakan sebuah penyerahan kewenangan dan tanggung jawab atas pelayanan publik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pada dasarnya Desentralisasi sendiri menyangkut mengenai distribusi kekuasaan yang berasal dari pemerintah, yang dilaksanakan secara utuh oleh pemerintah yang ada di daerah Kabupaten dan pemerintah daerah kota. Menurut Viktor Nižňanský, Ivan Mikloš, Elena Žárska mengatakan bahwa desentralisasi adalah :

*the transfer of authority and responsibility for public functions from the central government to subordinate or quasi-independent government organizations and/or the private sector*<sup>3</sup>. Selain itu Dennis

---

<sup>3</sup>Viktor Nižňanský, Ivan Mikloš, Elena Žárska 1998. *New system of financing public administration in Slovakia*), M.E.S.A. 10, hal. 3.

Rondinelli menyatakan desentralisasi merupakan sebuah *the transfer of authority and responsibility of public functions from the central government to subordinate or quasi-independent government organizations*<sup>4</sup>.

Sedangkan kata fiskal sendiri didalam desentralisasi fiskal biasanya suatu kegiatan yang berhubungan dengan aspek financial atau dengan keuangan, namun biasanya fiskal sendiri selalu dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan aspek keuangan dan financial. Kebijakan fiskal adalah sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan dengan penggunaan pajak, pembelian pemerintah atas barang dan jasa untuk merubah arah kurva keseluruhan permintaan. Selain itu, menurut Eko Suprayitno, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasi tujuan-tujuan

ekonomi<sup>5</sup>, kemudian Sadono Sukirno memberikan pendapatnya mengenai kebijakan fiskal adalah merupakan langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaan dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi<sup>6</sup>.

Maka desentralisasi fiskal merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke Pemerintah daerah dalam melakukan kegiatan ekonomi dan pengelolaan keuangan. Desentralisasi fiskal sendiri merupakan bagian dari tindakan reformasi di seluruh dunia, dimana kegiatan desentralisasi di seluruh dunia ini di dukung oleh World Bank, USAID, the Asian Development Bank, dan banyak lagi lembaga-lembaga yang menfokuskan diri pada sebuah pembangunan ekonomi dan strategi

<sup>4</sup>Dennis Rondinelli, 1981, "What is Decentralization?", dalam Jennie Litvack and Jessica Seddon 1999, DECENTRALIZIMI SHËNIME PËRMBLEDHËSË, Instituti I Bankës Botërore, Washington, D.C hal. 2.

<sup>5</sup>Eko Suprayitno, 2005, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 159.

<sup>6</sup>Sadono Sikorno, 2010, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 170.

pemerintah dalam pembangunan dan transisional ekonomi<sup>7</sup>.

Dalam penerapan desentralisasi fiskal terdapat beberapa manfaat antara lain terjadinya efisiensi ekonomis yaitu Anggaran daerah untuk pelayanan publik bisa lebih mudah disesuaikan dengan preferensi masyarakat setempat dengan tingkat akuntabilitas dan kemauan bayar yang tinggi, kemudian Peluang meningkatkan penerimaan pajak dari pajak daerah, pemerintah daerah bisa menarik pajak dengan basis konsumsi dan aset yang tidak bisa ditarik oleh pemerintah Pusat. Selain terdapat manfaat dari desentralisasi fiskal tentu saja terdapat kelemahannya antara lain lemahnya kontrol pemerintah pusat terhadap ekonomi makro, sulitnya menerapkan kebijakan stabilitas ekonomi,

sulitnya menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi dengan pemerataan, Besarnya biaya yang harus ditanggung pemerintah daerah daripada keuntungan yang didapat<sup>8</sup>.

Tujuan dari diterapkannya desentralisasi fiskal adalah meningkatkan dan memperbaiki kinerja dalam hal pengelolaan keuangan, moneter dan pengelolaan Pajak, menciptakan alokasi dana yang transparansi, dapat memprediksi sejumlah ketersediaan institusi lokal, dan otonomi dari pembuat kebijakan di tingkat daerah pada pemanfaatan sumber daya<sup>9</sup>.

<sup>7</sup>Bahl, Roy. Summer 1999a. "Fiscal Decentralization as Development Policy." Dalam James Edwin kee, 2002, *Fiscal Decentralization : Theory as Reform*, available cited at [https://www.gwu.edu/~clai/working\\_papers/James%20Kee%20Fiscal%20Decentralization%20paper%202003.pdf](https://www.gwu.edu/~clai/working_papers/James%20Kee%20Fiscal%20Decentralization%20paper%202003.pdf), diakses pada tanggal 8 Juni 2016.

<sup>8</sup> Wiapbn, 2015, Desentralisasi fiskal, available cited at [<sup>9</sup>UNDP, 1999, Decentralization : A Samling of Definitions \(Working paper Prepared in Connection with the Joint UNDP-Government of Germany evaluation of the UNDP role in decentralization and local government\), available cited at, <http://web.undp.org/evaluation/documents/decentr>](https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=definisi+of+decentralization+fiscal%2C+pdf&oq=definisi+of+decentralization+fiscal%2C+pdf&gs_l=serp.3..30i10.125527.147114.0.147486.52.47.5.0.0.0.571.6541.0j33j2j1j0j1.37.0....0...1c.1.64.ser p..10.42.6546...0j35i39j0i131j0i3j0i10j0i10i30j0i5i30j0i5i10i30j0i13j0i13i30j0i8i13i30j0i13i5i30j33i21.Z3j96So5fewdiakses pada tanggal 7 Juni 2016.</p>
</div>
<div data-bbox=)

## **2. Penerapan Desentralisasi Fiskal di Negara Cina**

Sekitar tahun 2000an pemerintah Cina mulai pada upaya desentralisasi fiskal sebagai langkah pengelolaan keuangan Negara dalam hubungan antara pusat dan daerah, desentralisasi fiskal sendiri merupakan transfer kewenangan di area tanggung jawab finansial dan pembuatan keputusan termasuk memenuhi keuangan sendiri, dan keinginan memperluas pendapatan lokal, kegiatan transfer pendapatan pajak dan otorisasi untuk meminjam dan memobilisasi sumber-sumber pemerintah daerah melalui jaminan peminjaman.

Dalam kaitannya dengan Desentralisasi fiskal, negara Cina melakukan pengelolaan perpajakan dengan memulai melaksanakan sistem pajak baru, yaitu sebuah sistem pajak dengan pembagian atau sistem gaya federal pajak. Sebelum negara Cina menerapkan sistem perpajakan yang baru,

pemerintah pusat tidak memiliki lembaga tersendiri untuk mengumpulkan pajak, semua hasil pajak negara Cina yang berasal dari provinsi-provinsi yang awalnya dikumpulkan oleh pemerintah daerah di provinsi dan kemudian pajak yang dikumpulkan di bagi bersama-sama oleh kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang melalui sebuah tawar-menawar.

Dengan mereformasi sistem pajak, hasil pajak dibagi dalam 3 kategori, yaitu hasil pajak untuk pemerintah pusat, hasil pajak untuk pemerintah daerah, dan hasil pajak yang berbagi. Pajak untuk pemerintah pusat akan disimpan di peti simpanan pemerintah pusat, sedangkan hasil pajak untuk pemerintah daerah akan digunakan pada anggaran daerah, dan hasil pajak untuk berbagi akan dibagi diantara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang berdasarkan pada perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Secara umum Administrasi pajak di negara Cina adalah terpusat.

Malah, mengizinkan petugas pajak dari pemerintahan di daerah untuk memungut hampir semua jenis pajak. Pemerintah pusat tidak memungut pajak melalui lembaga sendiri yang sifatnya bebas dari provinsi daerah, yang berarti bahwa pemerintah pusat telah membentuk pendapatan asli badan pengumpulan pajak atau pelayanan pajak nasional. Sistem baru juga mengakui kebebasan kekuasaan daerah, maka itu, kekuasaan daerah dan pemerintah yang lebih rendah dapat mengumpulkan beberapa jenis dari pajak tanpa campur tangan di atasnya. Maka terdapat dua kesamaan dan kebebasan sistem dari pajak administrasi, sistem nasional dari pajak pusat dan pajak daerah untuk diberikan kepada daerah, kemudian Pajak berbagi dimana dipungut oleh pemerintah pusat, dan kemudian dibagi diantara pemerintah pusat dan daerah provinsi<sup>10</sup>

Selain itu, sumber perolehan pendapatan pajak juga dibagi berdasarkan 3 kategori pajak yang diterapkan oleh Cina, yaitu :

1. Sumber pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah pusat yaitu: Cukai Pajak<sup>11</sup>; Pajak yang dikumpulkan dari pelayanan kereta api dan dari kantor Bank pusat dan perusahaan asuransi; Pajak penghasilan, pajak penjualan dan royalty dari kegiatan minyak di lepas pantai milik perusahaan asing dan joint venture; Energi dan dana kontribusi transportasi; Tujuh persen dari tiga pajak penjualan yang dikumpulkan dari perusahaan yang dimiliki oleh departemen perindustrian, departemen kekuasaan, SINOPEC (petrokimia), dan perusahaan non logam besi Cina; Semua bea cukai dan PPN dan cukai pajak atas import; Pajak penghasilan perusahaan yang dikumpulkan dari Bank dan lembaga keuangan lainnya.
2. Sumber pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah, antara lain: Pajak Kegiatan bisnis (penerimaan kotor) yang jatuh pada sektor-sektor yang tidak tercakup oleh PPN yaitu transportasi dan komunikasi, konstruksi, keuangan dan asuransi, pos dan telekomunikasi, budaya dan

<sup>10</sup> Loren Brandt and Thomas G. Rawski, 2008, Dkk., "*China's Great Economic Transformation*", Cambridge University Press, New York, hal. 66.

<sup>11</sup>Excise taxes are selective taxes on the sale or use of specific goods and services, such as alcohol and gasoline. Lihat James R. Hines Jr, 2007, Excise Taxes, Working Paper Series, Michigan Ross School of Business from Office of Tax Research, hal. 1.



olahraga, hiburan, hotel dan restoran, dan lainnya; Pajak dari pasar pedesaan (sewa kios), pajak perdagangan; Pajak pemeliharaan perkotaan dan pajak konstruksi (biaya tambahan atas kewajiban pajak perusahaan atas pajak usaha, pajak konsumsi, dan PPNa); Pajak menggunakan fasilitas perkotaan; Pajak kendaraan bermotor dan penggunaan pemanfaatan kapal; Tiga puluh persen produk dan pendapatan PPN yang dikumpulkan dari perusahaan milik departemen perindustrian, departemen kekuasaan, SINOPEC (petrokimia), dan perusahaan non logam besi Cina; Pajak pertambahan nilai atas tanah; Pajak tambahan pendidikan; Pajak hiburan dan potongan pajak; Pajak kekayaan; Pajak tambahan pada perusahaan kolektif; Pajak sumber daya; Pajak tetap asset investasi (dihentikan pada tahun 1999); Denda untuk pajak nakal.

3. Sumber pendapatan yang diterima atas sistem pajak berbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah : Pajak pertambahan nilai (75% untuk pusat dan 25 % untuk daerah); Pajak dari sumber daya alam ( batubara, minyak gas, dan mineral lain apabila perusahaan pengelola tersebut sepenuhnya milik Cina); Pajak Konstruksi atas biaya konstruksi bangunan yang berada diluar rencana dan dibiaya dari laba yang ditahan; Pajak garam; Pajak industri dan komersial yang dikenakan pada sebuah perusahaan asing dan perusahaan campuran; Pajak keamanan dan pajak pertukaran (50% untuk pemerintah pusat,

50% untuk pemerintah daerah); Pajak penghasilan perusahaan besar: Pajak penghasilan pribadi.<sup>12</sup>

Selain dalam sistem perpajakan, upaya serupa juga diterapkan dalam sistem Bank pusat dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Negara Cina, Bank pusat dan masyarakat Bank memiliki cabang di setiap provinsi di negara Cina. Dalam perbangkan di Negara Cina, Cabang Bank daerah sering terkena pengaruh dari kebijakan pemerintah daerah sejak pegawai cabang Bank daerah yang ditunjuk dan mereka memberikan kesejahteraan hanya untuk pemerintah yang ada di daerah. Ini sering menyebabkan Bank cabang di daerah mengabaikan perintah dari Bank di pusat dan tunduk pada pengaruh kebijakan daerah. Sedangkan Bank cabang di daerah yang berasal dari Bank pusat yang sering menjadi sebuah instrument yang berguna bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi

---

<sup>12</sup> World Bank (2002) table 4.1.

daerah, pertumbuhan ekonomi yang cepat di daerah, diraih dengan mengorbankan stabilitas ekonomi nasional. Maka desentralisasi dalam perbangkan di pusat melakukan evaluasi yang menyebabkan ekonomi makro menejemen pada tahun 1992. setelah tahun 1998, pemerintah pusat di Negara Cina melakukan implementasi untuk mereformasi sistem pengelolaan keuangan Cina yaitu seluruh cabang dari Bank-Bank di pusat yang ada di daerah/provinsi telah dieliminasi dan Sembilan lintas provinsi atau mendirikan Bank cabang yang bersifat regional. Reformasi ini memberi gangguan kepada daerah-daerah dalam hal sistem perbangkan pusat<sup>13</sup>.

Dalam era refrormasi, Negara Cina juga melakukan reformasi anggaran yang merupakan salah satu kunci instrument untuk alokasi sumber daya dan manajemen makro ekonomi. Reformasi anggaran sangat bermanfaat sebagi

instrument kebijakan untuk memenajemen pengeluaran Negara Cina, namun terhambat oleh semakin tidak pantasnya proses anggaran<sup>14</sup>.

Proses anggaran adalah pasif dan tambahan dalam menyediakan waktu yang kurang untuk persiapan, yang memiliki perhatian yang sedikit dalam prioritas strategi, dan tidak dapat menggantikan pengeluaran untuk kebutuhan yang muncul atau untuk melacak bagaimana dana Negara di Cina yang dibelanjakan atau bahkan bagaimana orang-orang di pemerintahan dipekerjakan.

Reformasi anggaran merupakan salah satu isu yang menonjol pada tahun 1999 di Negara Cina, ketika Auditor Nasional yang bersifat umum menerbitkan kritikan yang tajam terhadap pelaksanaan anggaran pada tahun 1998 dalam pengelolaan anggaran Negara secara

---

<sup>13</sup>Brand and Rawski, Dkk, China's "Great Economic Transformation" ( Foe a discussion of China's system ), hal. 69.

---

<sup>14</sup> Word Bank, 2000, for an in-depth analysis of China's public expenditure management system in the late 1990s. the report's analysis remains relevant since many of the problems persist.

umum. Maka itu keprihatinan ini menyebabkan program yang komprehensif mereformasi anggaran di Negara Cina. Maka dalam Kongres Nasional mengarahkan perubahan segera dilakukan untuk siklus anggaran berikutnya, termasuk pengenalan prosedur pengadaan standar untuk mengurangi pengurangan terhadap yang tidak diperlukan dan mengurangi tingkat korupsi, ke system yang transparansi umum, yang menyangkut semua pengiriman antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, konsultasi yang lebih erat dengan anggota kongres nasional untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses penganggaran<sup>15</sup>. Sehingga ini juga berlaku pada setiap menteri-mentri di kabinet pemerintahan untuk menstandarisasi semua anggaran, dan melakukan ekstra anggaran serta sumber daya lainnya, selain itu dalam hal perbelanjaan yang merupakan langkah

penting untuk menuju perbaikan akuntansi dan anggaran untuk dana ekstra dalam penyelenggaraan dan pengenalan standar baru untuk pengadaan pemerintah.

Dalam pelaksanaan reformasi di negara Cina, selain menggunakan system Desentralisasi fiskal juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi untuk pelayanan publik, dengan mendirikan unit-unit pelayanan publik (PSUs) yang bekerjasama dengan badan yang bukan berasal dari pemerintah, dimana unit-unit pelayanan publik (PSUs) ini memberikan pelayanan publik dengan mendirikan sekolah dan rumah sakit, serta menyediakan pelayanan kesehatan untuk umum.

#### **4. Penerapan Desentralisasi Fiskal di Negara Indonesia**

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia, pemberian kewenangan dari pemerintah di pusat ke pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan pajak (*taxing power*) dan

---

<sup>15</sup>This last point was a logical extension of creation of the Budget Committee in early 1999 to replace the more general-purpose Economic and Finance Committee.

melakukan transfer ke daerah, pelaksanaan desentralisasi melalui pemungutan pajak (*taxing power*) untuk daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dikuatkan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah. Maka dengan adanya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah berarti negara Indonesia menunjukkan keinginan untuk memperluas basis pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian melakukan penambahan jenis pajak dan retribusi daerah serta meningkatkan tarif minimum beberapa jenis pajak di daerah, dan memberikan diskresi penetapan tarif pajak.

Di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah terdapat 4 kebijakan yang mendasar yaitu:

1. *Closed-list System* untuk jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah;
2. Penguatan *local taxing power*;

3. Perbaikan sistem pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui mekanisme bagi hasil pajak provinsi yang lebih ideal dan kebijakan earmarking jenis pajak tertentu;
4. Peningkatan efektivitas pengawasan pungutan daerah dengan mengubah mekanisme pengawasan represif menjadi preventif dan korektif.

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal yang diterapkan di Indonesia terdapat beberapa elemen penting, yaitu<sup>16</sup>:

1. Sistem dana perimbangan (sistem transfer antar tingkat pemerintah), adapun penerapan sistem transfer yang dilakukan Indonesia yang dicirikan berdasarkan 4 kategori yaitu:
  - a) Sering adanya perubahan formula untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK);
  - b) Peningkatan cakupan sector dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan penerapan *earmarked* pengeluaran dari alokasi

---

<sup>16</sup>Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016, *Grand Design Desentralisasi Fiskal Indonesia*, Available cited at <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/web/attachments/article/186/GrandDesignFD2.pdf>, diakses pada tanggal 13 Juni 2016.

- Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima oleh daerah;
- c) Perubahan total alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- d) Belum adanya hubungan antara transfer dan expenditure assignments atau target pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)
2. Sistem pajak dan pinjaman daerah, yaitu guna memperkuat pendanaan daerah dan sekaligus memacu percepatan pembangunan di daerah, namun pinjaman yang dilakukan harus dikembalikandanya dan memberikan konsekuensi biaya seperti halnya bunga pinjaman, sehingga sistem pinjaman daerah ini mengatur tentang batasan pinjaman kepada daerah, sumber pinjaman, jenis dan jangka waktu pinjaman, penggunaan pinjaman, persyaratan pinjaman, prosedur pinjaman daerah, dan pelaporan pinjaman beserta dengan sanksinya yang mana semua itu diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2003 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah.
3. Sistem administrasi dan anggaran pemerintah pusat dan daerah, yaitu menekankan pada efisiensi dari pengeluaran pemerintah, dan pengelolaan anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mana menuntut pemerintah daerah untuk lebih disiplin secara fiskal. Dalam sistem proses administrasi penganggaran antara pemerintah pusat dan pemerintah memberikan akuntabilitas dari pengeluaran (berupa input), kemudian menciptakan keterkaitan dengan kinerja pemerintah (berupa output), selain itu keterkaitan dengan.
4. Penyediaan pelayanan publik dalam konteks penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM), untuk penyediaan

layanan public, otonomi yang luas untuk tingkat kabupaten/ kota, serta merupakan langkan pemerintah pusat untuk mempertahankan kesamaan akses pada penyampaian layanan dasar, oleh karena itu, konsep penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) harus juga mempertimbangkan diskresi bagi pemerintah daerah. Standar Pelayanan Minimum (SPM) ini juga menjadi tolak ukur rata-rata minimum nasional bagi daerah merupakan salah satu indikator yang terukur dan objektif.

Berkaitan dengan adanya dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke daerah berdasarkan presentasi tertentu yang tujuannya untuk mendanai kebutuhan di daerah.

Sumber-sumber penerimaan pendapatan negara yang berasal dari daerah dibagi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan prinsip

pemberian bagian proporsi yang lebih besar bagi daerah penghasil, dan memperhitungkan porsi pemerataan di wilayah provinsi yang bersangkutan. Pelaksanaan penetapan dan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) ke tiap-tiap daerah diarahkan pada peningkatan akurasi data melalui koordinasi dengan institusi pengelola penerimaan negara bukan pajak, menyempurnakan proses penghitungan dan penetapan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) secara transparan dan akuntabel, menyempurnakan sistem penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) tepat waktu dan tepat jumlah, serta penyelesaian kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Hubungan melakukan reformasi sistem pengelolaan uang negara dengan menggunakan sistem desentralisasi fiskal dimana dalam desentralisasi fiskal

merupakan transfer kewenangan di area tanggung jawab finansial dan pembuatan keputusan termasuk memenuhi keuangan sendiri, ekspansi pendapatan lokal, transfer pendapatan pajak dan otorisasi untuk meminjam dan memobilisasi sumber-sumber pemerintah daerah melalui jaminan peminjaman.

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia, dilakukan pemberian kewenangan dari pemerintah di pusat ke pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan pajak (*taxing power*) dan melakukan transfer ke daerah, yang semuanya diatur dalam bentuk sebuah undang-undang oleh pemerintah yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah. Maka dengan adanya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah. Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal yang diterapkan di Indonesia terdapat beberapa elemen penting, yaitu sistem data perimbangan (sistem transfer antar tingkat

pemerintah), Sistem pajak dan pinjaman daerah, Sistem administrasi dan anggaran pemerintah pusat dan daerah, Penyediaan pelayanan publik dalam kontek penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bahl, Roy. Summer 1999a. "*Fiscal Decentralization as Development Policy*." Dalam James Edwin kee, 2002, *Fiscal Decentralization: Theory as Reform*, available cited at [https://www.gwu.edu/~clai/working\\_papers/James%20Kee%20Fiscal%20Decentralization%20paper%202003.pdf](https://www.gwu.edu/~clai/working_papers/James%20Kee%20Fiscal%20Decentralization%20paper%202003.pdf), diakses pada tanggal 8 juni 2016.
- Brand and Rawski, Dkk, China's "Great Economic Transformation" (Foe a discussion of China's system).
- Dennis Rondinelli, 1981, "*What is Decentralization?*", dalam Jennie Litvack and Jessica Seddon 1999, *DECENTRALIZIMI SHËNIME PËRMBLEDHËSË*, Instituti I Bankës Botërore, Washington, D.C.
- Eko Suprayitno, 2005, *Ekonomi Islam ]Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Gabriella Montinola, Yingyi Qian and Barry R. Weingast, 1995, "*Federalism, chinese Style : The Political basic For Economic Success in China*" *World Politics*, 84.

Loren Brandt and Thomas G. Rawski, Dkk., 2008, “*China’s Great Economic Transformation*”, Cambridge University Press, New York.

Sadono Sikorno, 2010, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Viktor Nižňanský, Ivan Mikloš, Elena Žárska 1998. *New system of financing public administration in Slovakia*), M.E.S.A. 10.

World Bank, 2000, for an in-depth analysis of China’s public expenditure management system in the late 1990s. the report’s analysis remains relevant since many of the problems persist.

### Internet

UNDP, 1999, Decentralization : A Sampling of Definitions (Working paper Prepared in Connection with the Joint UNDP-Government of Germany evaluation of the UNDP role in decentralization and local government), available cited at, [http://web.undp.org/evaluation/documents/decentralization\\_working\\_report.PDF](http://web.undp.org/evaluation/documents/decentralization_working_report.PDF), diakses pada tanggal 6 Juni 2016.

Wiapbn, 2015, *Desentralisasi fiskal*, available cited at [https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=definisi+of+decentralization+fiscal%2C+pdf&oq=definisi+of+decentralization+fiscal%2C+pdf&gs\\_l=serp.3..30i10.125527.147114.0.147486.52.47.5.0.0.0.571.6541.0j33j2j1j0j1.37.0...0...1c.1.64.serp..10.42.6546...0j35i39j0i131j0i3j0i10j0i10i30j0i5i30j0i5i10i30j0i13j0i13i30j0i8i13i30j0i13i5i30j33i21.Z3j96So5few](https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=definisi+of+decentralization+fiscal%2C+pdf&oq=definisi+of+decentralization+fiscal%2C+pdf&gs_l=serp.3..30i10.125527.147114.0.147486.52.47.5.0.0.0.571.6541.0j33j2j1j0j1.37.0...0...1c.1.64.serp..10.42.6546...0j35i39j0i131j0i3j0i10j0i10i30j0i5i30j0i5i10i30j0i13j0i13i30j0i8i13i30j0i13i5i30j33i21.Z3j96So5few), diakses tanggal 7 Juni 2016.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2016, *Grand Design Desentralisasi Fiskal Indonesia*, Available cited at <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/web/attachments/article/186/GrandDesignFD2.pdf>, diakses pada tanggal 13 Juni 2016.